



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MURSALIM
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 143554

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.007.250.000

1. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA MUKOMUKO, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 682 m2/128 m2 di KAB / KOTA MUKOMUKO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 227.250.000
5. Tanah Seluas 700 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , WARISAN Rp. 280.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 148.500.000

1. MOTOR, HONDA TIGER SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 S CVT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
3. MOTOR, HONDA BLADE NF 11A1C M/T Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 140.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ---

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 104.978.257



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.401.228.257
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.401.228.257

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.